

BAB VII

KEBAHARUAN TEORITIS PEMILU DAN BENCANA: PETA TEORI, DAN LEGACY AKADEMIK

Pada bagian bab ini akan menjelaskan kebaruan secara teoritis, temuan dan analisis disertasi yang diperoleh berdasarkan pembabatan teori maupun temuan lapangan serta analisis. Pada bagian ini penulis membagi menjadi 3 (tiga) pokok pembahasan yakni pemetaan kajian pemilu dan bencana berdasarkan kedalaman literatur review dan analisis kajian. Studi pemilu dan bencana sebagai ruang untuk menciptakan kebaruan pada kajian pemilu dan bencana serta kontribusi akademik baik secara teoritis maupun praktis.

7.1 Peta Kajian Pemilu Dan Bencana

Kajian pemilu dan bencana sebelumnya banyak di riset oleh berbagai peneliti dunia dengan berbagai macam perdebatan pada level metode, teori, analisis dan temuan. Kajian pemilu dan bencana menunjukkan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) pembagian peta kajian yaitu: (1) Retrospeksi Buta (*Blink retrospection*), peristiwa bencana alam dapat menjadi tantangan dan batu sandungan bagi petahana dalam kontestasi kekuasaan (2) Retrospeksi Penuh Perhatian (*Thoughtfull Retrospection*), peristiwa bencana alam dapat menjadi peluang memenangkan kontestasi pemilihan jika situasi bencana dapat dimanfaatkan oleh para kandidat (3) Retrospeksi Partisan, bahwa peristiwa bencana alam tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian penghukuman ataupun penghargaan terhadap kandidat petahana melainkan di pengaruhi oleh dukungan bawaan sebelum bencana terjadi seperti, partisan kekerabatan maupun dukungan politik.

Pertama, Retrospeksi Buta (*Blink retrospection*) kajian pemilu dan bencana dalam persepektif kekalahan petahana dalam kontestasi pemilihan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada kajian ini pemilih memasukan upaya bantuan dari pemerintah ataupun pejabat petahana dalam penilain mereka sebagai pertimbangan untuk menentukan sikap politiknya sebelum pemilihan dilakukan.

Kedua, Retrospeksi Penuh Perhatian (*Thoughtfull Retrospection*), peristiwa bencana alam dapat menjadi peluang memenangkan kontestasi pemilihan, beberapa peneliti sebelumnya. Pada kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan (korelasi) positif antara belanja bantuan dan dukungan pemilih untuk partai petahana dalam pemilu. Pemilih melakukan retrospeksi penuh perhatian terhadap petahana dengan memberikan penilaian terhadap pejabat (petahana) berdasarkan operasi bantuan yang dilakukan setelah bencana alam terjadi. Adapun beberapa variabel yang digunakan untuk melihat hubungan tersebut yaitu: (1) kompetensi dalam menangani dampak dan memastikan kompensasi yang cepat, (2) Efektivitas tata kelola dan (3) Deklarasi Pro terhadap isu bencana.

Ketiga, Heersink (2022) menambahkan satu teori dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu “Retrospeksi Partisan” bahwa pemilih memberikan penghargaan ataupun hukuman kepada petahana setelah terjadi dipengaruhi oleh apakah pejabat tersebut merupakan rekan atau tidak (partisan kekerabatan dan politik) sikap pemilih terhadap kerusakan akibat alam sangat dipengaruhi oleh sikap keberpihakan yang sudah ada sebelumnya, baik itu terhadap partai politik pendukung maupun calon petahana. Dalam pandangan retrospeksi partisan bahwa peristiwa bencana alam tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian penghukuman ataupun penghargaan terhadap kandidat petahana melainkan di

pengaruhi oleh dukungan bawaan sebelum bencana terjadi seperti, partisan kekerabatan maupun politik.

Meskipun kajian terdahulu telah banyak membahas mengenai hubungan antara pemilu dan bencana, sebagian besar studi masih terjebak pada pendekatan temuan yang bersifat makro yakni bencana berpengaruh terhadap kemenangan petahana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Disertasi ini mengisi celah dengan menjelaskan bagaimana narasi kegagalan penanganan bencana dan harapan tidak terpenuhi justru menjadi penyebab petahana mengalami kekalahan. Selain itu, disertasi ini menunjukkan penguatan dan penajaman dari sisi temuan berdasarkan teori “Retrospeksi Buta” (*Blink retrospection*), yang dijelaskan pada kajian Archen dan Bartels (2016) dkk. Bahwa peristiwa bencana memiliki sumbangan besar terhadap tumbangnya petahana NADI pada perhelatan Pilkada di KLU tahun 2020.

Pergeseran peristiwa alam menjadi isu kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah siklus teknis dalam penanganan bencana namun lebih besar dari itu, bagaimana peristiwa bencana alam menjadi isu kebijakan terkonversi menjadi isu kontestasi dalam pemilu. Tata kelola penanganan bencana menjadi isu utama dan strategis oleh para kandidat berkaitan dengan pembangunan kembali perumahan warga masyarakat dan pemberian bantuan sosial jaminan hidup kepada korban bencana gempa di Lombok Utara.

7.2 Kontribusi Akademik Kajian Pemilu Dan Bencana

Disertasi ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan melakukan penggabungan antara teori bencana, pemilu, dan politik yang selama ini dipergunakan secara terpisah. Melalui pendekatan transdisipliner, penelitian ini

memperluas jangkauan studi ilmu politik dengan memperkenalkan variabel tata kelola penanganan bencana sebagai variabel yang dapat memperlemah dukungan suara petahana berdasarkan pada persepsi kegagalan penanganan bencana, persepsi harapan yang tidak terpenuhi serta struktur bageting yang berada di luar kendali petahana. Kebaharuan penelitian ini tergambarkan pada pergeseran kajian pemilu yang selama ini terfokus pada hal-hal yang bersifat prediktif menuju pada aspek non prediktif yaitu bencana. Akhirnya, riset ini memberikan kedalaman kajian yang menyeluruh serta memperluas khazanah literatur bencana dan pemilu tetapi memberikan ruang kebaruan dalam melihat kontestasi politik dalam konteks bencana sebagai pondasi yang utuh.

7.3.1 Eskalasi Bencana: Menjadi Isu Politik

Bencana dipahami sebagai sebuah peristiwa politik yang membutuhkan kematangan tata kelola, sumber daya manusia, serta struktur bageting penanganan bencana yang jelas meskipun kewenangan itu ada pada pemerintah pusat bukan di daerah. Bencana sebagai peristiwa politik dapat dilihat dari bagaimana respons petahana terhadap situasi pasca bencana alam terjadi. Kinerja yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap petahana sedangkan kinerja yang dianggap buruk dapat berpengaruh terhadap dukungan politik publik. Tata kelola krisis bencana merupakan faktor politik yang signifikan terhadap hasil pemilihan, dengan membangun isu penanganan bencana sebagai modal dalam melakukan kampanye oleh para kandidat. Sehingga dengan demikian, bencana alam tidak hanya dimaknai sebagai sebuah peristiwa natural namun merupakan sebuah peristiwa politik yang tidak berdiri sendiri. Kemampuan para kandidat dalam

merespons isu publik menjadi faktor signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat di tengah kondisi krisis.

7.3.2 Bencana sebagai Variabel Penentu Legitimasi Kekalahan Petahana

Ketidakmatangan petahana dalam tata kelola bencana menjadi persepsi kegagalan dan harapan yang tidak terpenuhi yang pada akhirnya terkonversi menjadi melemahnya kekayaan elektoral petahana yang menyebabkan kekalahan. Semakin menguatnya kekecewaan dan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja petahana dalam penanganan bantuan perumahan dan bantuan sosial yang banyak persoalan dalam pelaksanaan menimbulkan persepsi buruk terhadap kinerja petahana. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Lombok Utara pada tahun 2020, bahwa persepsi publik berkaitan dengan kemampuan petahana dalam merespons situasi krisis menjadi variabel yang krusial yang dapat menentukan petahana mendapatkan simpati atau justru mendapatkan gelombang perlawanan dan kemarahan publik yang tidak puas terhadap kinerja petahana.

(1) Persepsi Kegagalan Penanganan Bencana.

Manajemen penanganan bencana yang tidak maksimal menjadikan persepsi publik negatif terhadap petahana yang telah gagal menangani persoalan perumahan dan jaminan hidup kepada masyarakat korban bencana gempa. Bantuan bencana yang seharusnya dapat memperkaya kekayaan elektoral petahana justru bencana memperlemah kekayaan elektoral kandidat petahana berkaitan dengan tata kelola bencana yang tidak maksimal. Respons yang lamban dan tingkat koordinasi yang buruk mengakibatkan kerugian elektoral bagi kandidat petahana.

(2) Persepsi harapan yang tidak terpenuhi

Penyelesaian penanganan pasca bencana sesuai dengan apa yang menjadi harapan pada masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah daerah ternyata belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan maksimal. Terutama terkait dengan Pembangunan fisik perumahan tahan gempa (RTG) dan bantuan sosial berupa jaminan hidup bagi warga masyarakat yang terdampak. Kinerja pemerintah daerah dalam masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi sorotan dan evaluasi serta bahan penilaian bagi masyarakat berkaitan dengan kinerja yang lambat dan tidak tepat dalam melakukan proses verifikasi terhadap kondisi masyarakat berdampak kepada tergerusnya kepercayaan publik kepada petahana.

Bencana menjadi variabel penentu legitimasi kekalahan petahana NADI pada Pilkada Lombok Utara 2020. Penanganan bencana tidak dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat dukungan elektoral petahana namun justru menjadi batu sandungan. Persepsi publik yang dominan terbangun adalah kegagalan penanganan bencana oleh kandidat petahana yang tidak mampu membendung isu penanganan bencana yang semakin masif. Penyajian data dan progres pembangunan perumahan dan bantuan sosial jaminan hidup yang terus di sampaikan oleh petahana bukan lantas memberikan kepercayaan kepada publik tetapi justru menimbulkan ketidakpercayaan.

7.3 Kebaharuan Teoritis

Kajian mengenai hubungan pemilu dan bencana (*disaster politics*) sudah sangat kaya secara global mulai dari studi klasik Healy dan Malholtra (2009), Achen dan Bartles, (2016), Fukomuto (2024), dan Kim (2025), mereka pada umumnya menyimpulkan dua pola: pemilih dapat memberikan penghargaan jika bantuan cepat dan sesuai dengan harapan mereka atau memberikan penghukuman jika bantuan lambat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat integrasi faktual antara *Misattributed Blink Retrospection* dan *Negative Mindful Retrospection* dalam kasus tumbangya petahana NADI pada Pilkada Lombok Utara 2020.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekalahan petahana tidak hanya dipahami sebagai kegagalan secara struktural dan operasional semata, melainkan sebagai realitas sosial yang terbentuk melalui suatu proses konfigurasi sosiopolitik. Secara ontologis temuan ini menempatkan bahwa kekalahan petahana sebagai kegagalan sistemik yang keberadaanya tidak dapat direduksi pada satu kegagalan struktural ataupun operasional saja. Posisi ini sekaligus yang membedakan temuan dengan penelitian dari persepektif yang menempatkan kegagalan sistemik sebagai unit ontologis utama yang menjadi pokok penjelas dari kekalahan petahana pada arena kontestasi elektoral. Dengan demikian, perbedaan ketiga teori tidak hanya berada pada level variabel, metode maupun indikator, tetapi pada hal yang lebih fundamental mengenai perubahan struktur dan operasional secara sistemik menyebabkan kekalahan petahana pada arena kontestasi lokal. Temuan ini mengeser paradigma dari ontologi klasik yang bersadar pada dua pola pemilu retrospektif yaitu: pemilih memberikan penghargaan jika bantuan cepat dan

memberikan penghuman jika bantuan cepat. Penelitian ini menegaskan bahwa kekalahan petahana NADI merupakan “*Retrospektive Multiplication effect Theory*” antara struktur dan operasional.

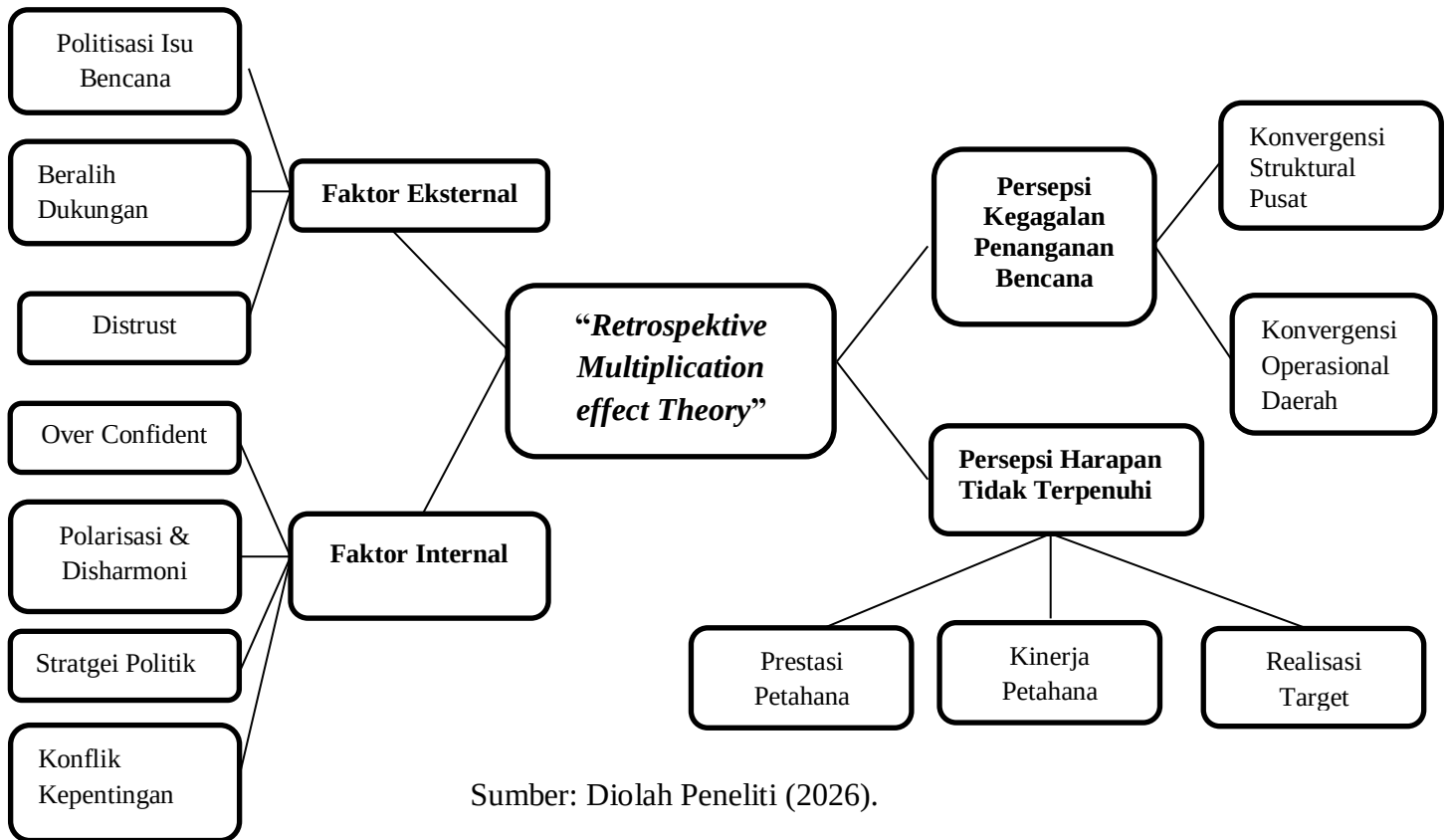
Kekalahan petahana NADI tidak dapat dikotomi pada satu kendala secara terpisah melainkan harus diletakan pada satu kesatuan yang saling berdampingan. Kegagalan sistemik struktural nasional menjadi pemicu gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja operasional birokrasi pada akar rumpu di bawah. Meskipun secara teoritis kajian mengenai perilaku pemilih memunculkan ketegangan konseptual tetapi dapat dijelaskan melalui mekanisme atribusi lokal atau di sebut sebagai *local proxy attribution*. Dalam padangan publik tidak melakukan pemisahan secara kewenangan teknokratis maupun secara administrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Penderitaan dan rasa trauma yang berkepanjangan direspon dengan memberikan penghukuman (*blink punishment*) pada petahana atas kompleksitas penderitaan yang dirasakan dibebankan kepada petahana daerah yang dianggap sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Runtuhnya kekuatan elektoral petahana pada Pilkada Lombok Utara tahun 2020 merupakan sebuah fenomena sosiopolitik yang langka dalam melihat perilaku pemilih pada situasi krisis yaitu pertemuan antara *Misattributed Blink Retrospection* dengan *Negative Mindful Retrospection*. Penyatuan kedua arus negatif inilah menjadi katalisator utama amuk elektoral publik pasca bencana terhadap petahana NADI sehingga mengalami kekalahan. Konvergensi struktural dan operasional sangat menentukan runtuhnya legitimasi petahana pada kontestasi kekuasaan pada situasi krisis meskipun hanya bersifat jangka pendek.

Dinamika pemilu dan bencana menyajikan temuan secara terpisah, retrospeksi buta dan retrospeksi penuh perhatian negatif, temuan baru ini mematahkan determinasi politik klasik yang memperhitungkan pemilih memberikan penghukuman kepada kandidat petahana karena aspek bencana geologis ataupun aspek lainnya seperti nilai ekonomi. Temuan disertasi ini justru menunjukkan hasil sebaliknya yaitu teori “*Retrospektive Multiplication effect Theory*” (Teori Efek Multiplikasi Retrospektif) ini membuktikan bahwa adanya efek platuk ganda (*dual-trigger effect*) di mana kegagalan manajemen struktural pusat diamplifikasi secara destruktif oleh operasional birokrasi daerah yang tidak berjalan maksimal karena berbagai kendala teknis dilapangan.

“*Retrospektive Multiplication effect Theory*” (Teori Efek Multiplikasi Retrospektif) merupakan istilah yang peneliti gunakan untuk menyajikan temuan lapangan penelitian dengan melihat dimensi-dimensi yang yang digunakan oleh Archen Bartels (2002) dkk, Healy dan Malhotra, serta Boris Heersink dkk (2022), dalam menganalisis kontestasi politik dalam konteks bencana pada Pilkada Lombok Utara 2020. Mengadopsi teori Retrospeksi buta, Retrospeksi Penuh Perhatian dan Retrospeksi Partisan Archen dkk, menjelaskan fenomena kekalahan petahana pada Pilkada Lombok Utara merupakan bentuk eksploitasi isu bencana menjadi isu kebijakan dan isu elektoral. Dengan menggunakan ketiga teori tersebut peneliti menemukan bahwa kekalahan petahana NADI pada kontestasi Pilkada KLU terletak pada dimensi kegagalan secara struktural dan operasional terkait dengan capaian penanganan bencana. Dimensi inilah yang kemudian dikonseptualisasikan sebagai “*Retrospektive Multiplication effect Theory*” (Teori Efek Multiplikasi Retrospektif) terhadap tata kelola penanganan bencana di KLU.

Gambar.7.1 Retrospektive Multiplication Effect Theory



Pada gambar 7.1 di atas, menjelaskan bahwa pemilu dan bencana tidak selalu identik dengan kemenangan petahana melalui pemanfaatan keuntungan secara elektoral sebagai yang dijelaskan oleh Bechtel dan Hainmueller (2011), Healy dan Malhotra (2009), Roberto Ramos san Carlos Sanz (2018), dalam teori “Retrospeksi Penuh Perhatian. Temuan lapangan disertasi ini memperkuat kajian sebelumnya yang dilakukan oleh, Archen dan Bartels (2002, 2016), Gasveer dan Reeves (2011) telah mendirikan landasan teori untuk “Restrospeksi Buta”, bahwa terdapat korelasi antara perilaku pemilih sebagai bentuk perlawanan (*resistensi*) terhadap petahana.

Dalam konteks kekalahan petahana NADI menunjukan sebuah peristiwa kesalahan atribusi dari masyarakat (pusat dan daerah), oleh publik kepada pejabat petahana, di sisi yang lain, fakta menunjukan bahwa adanya fakta kegagalan birokrasi lokal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk retrospeksi penuh perhatian yang bermakna negatif (*Negatif Mindful Restrospection*). Kekalahan pasangan NADI memperkuat dua pertalian sebuah rekontruksi konsep hubungan dua sisi retrospeksi buta dan retrospeksi penuh perhatian negatif. Kegagalan struktural secara eksternal merupakan wujud dari *Misattributed Blink Retrospection* yang melihat bahwa tata kelola penanganan bencana pada penilaian secara obyektif berdasarkan dana stimulan mengalami keterlambatan distribusi karena struktural regulasi dan anggaran dari pemerintah pusat bukan pada tupoksi daerah. Namun, publik melakukan salah-atribusi terhadap kewenangan pusat yang dibebankan kesalahan struktural kepada bupati petahana.